



UNDANG-UNDANG
NARKOTIKA
(UU No. 22 Tahun 1997)

&

PSIKOTROPIKA
(UU No. 5 Tahun 1997)

2006



INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH
SETDA KABUPATEN BUTON

5.2.3.82.07

TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG
BERADA DIRUANGAN TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB
RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG

Penerbit "PRESSINDO" Jakarta

UNDANG-UNDANG
NARKOTIKA

UU No. 22 Th. 1997



UNDANG-UNDANG
PSIKOTROPIKA

UU No. 5 Th. 1997

DILENGKAPI DENGAN :

3 Keputusan Kepala BPOM Tahun 2002
tentang
Penambahan Jenis Prekursor
Pemantauan dan Pengawasan Prekursor
Pengaturan Khusus Penyaluran dan Penyerahan
Buprenorfin

2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Th. 1997
tentang Peredaran Psikotropika
Ekspor dan Impor Psikotropika

UU RI No. 7 Th. 1997

tentang

Pengesahan "United Nation Convention
Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances", 1988

UU RI NO. 8 Th. 1996

tentang

Pengesahan Convention on Psychotropic
Substances 1971

Penerbit "PRESSINDO" Jakarta

UNDANG-UNDANG
NARKOTIKA
UU No. 22 Th. 1997
&
UNDANG-UNDANG
PSIKOTROPIKA
UU No. 5 Th. 1997

Cetakan Pertama, 2006

Diterbitkan oleh :
PRESSINDO
Jakarta

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Narkoba dan psikotropika sudah menjadi masalah nasional di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini semakin gencar melaksanakan berbagai operasi pemberantasan narkotika karena telah menjadi ancaman yang serius bagi bangsa ini.

Untuk mendukung semua tindakan pemberantasan terhadap peredaran narkoba dan psikotropika, maka perlu kiranya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dengan disahkan Undang-Undang ini, diharapkan dapat efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkotika di wilayah Republik Indonesia ini.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ini dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substance* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) serta peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disertai lampiran 1,2 dan 3 yang berhubungan dengan Narkoba dan Psikotropika.

Diharapkan juga dengan adanya Undang-Undang ini, masyarakat juga mengetahui tentang masalah hukum yang dapat ditimbulkan oleh narkoba. Dan semoga buku ini mampu memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian.

Penerbit

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	1
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika	79
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances</i> , 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988)	135
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psicotropika	153
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 785/Menkes/Per/VII/1997 tentang Ekspor dan Impor Psicotropika	164
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan <i>Convention on Psychotropic Substances</i> 1971 (Konvensi Psicotropika 1971)	179
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 853/Menkes/SK/X/1993 tentang Penunjukan Laboratorium Rumah Sakit Ketergantungan Obat sebagai Laboratorium Pemeriksa Cairan Tubuh untuk Mendeteksi Adanya Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya sebagai Penunjang Diag-nosis Penyalahgunaan Zat	231
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK. 00.05.35.02770 tentang Penambahan jenis Prekursor	223

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK. 00.05.35.02771 tentang Pemantauan dan Pengawasan Prekursor 236
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: PO.01.01.31.03660 tentang Pengaturan Khusus Penyaluran dan Penyerahan Buprenorfin 249